

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (STUDI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR)

Nur Asiah

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar
nr.asiah.cia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Yuridikitas kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, (2) Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini: (1) Yuridikitas Kebijakan MBKM telah sejalan dengan dasar hukum dan tujuan untuk menyediakan pendidikan yang layak dan lebih baik; (2) Pelaksanaan Kebijakan MBKM di FIS-H UNM, yaitu a) Kurikulum, telah disusun oleh 9 dari 10 program studi di FIS-H UNM dengan berpedoman pada Buku Pedoman MBKM. b) Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi tahun ajaran 2020/2021, di FIS-H UNM telah melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan program magang, program kewirausahaan, KKN tematik, kerjasama bidang penelitian dan publikasi, serta mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 1 yang dilaksanakan Kemendikbud. Program MBKM yang dilaksanakan di FIS-H UNM telah berjalan dengan baik. c) Kultur Belajar yang Inovatif, Variatif dan Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa, program MBKM yang dijalankan sudah inovatif dan telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, namun dalam unsur variatif masih kurang sebab proses pembelajaran yang relatif sama. (3) Kendala Pelaksanaan Kebijakan MBKM di FIS-H UNM, yaitu; a) Kendala Program Studi dan dosen adalah perlunya menyesuaikan ulang kurikulum, kurangnya SDM dan mitra magang serta kewirausahaan, masih kurangnya prodi lain yang menjalankan MBKM a) Kendala yang dialami Mahasiswa yaitu jaringan yang kurang stabil, proses pembelajaran yang kurang interaktif, sosialisasi yang masih perlu dimassif terkhusus di program studi, lambatnya penginputan nilai, kurangnya kegiatan di masa covid.

KATA KUNCI: IMPLEMENTASI, KEBIJAKAN, MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

PENDAHULUAN

Mendorong bangsa yang cerdas mesti diawali dengan pemenuhan hak pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemenuhan hak tersebut telah dituangkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pentingnya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) membuat kementerian seringkali mengeluarkan kebijakan baru untuk mendorong proses pendidikan yang lebih baik. Salah satu contohnya, pada pemerintahan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu tentang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47). Program ini didasari untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78). Pencanangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa mampu menghadapi perkembangan zaman mulai dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Perguruan tinggi diharapkan mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian belajarnya dengan optimal.

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dalam suatu perguruan tinggi sangat diperlukan. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UNM akan dimulai pada semester gasal

tahun akademik 2020/2021 ini. didasari dengan telah dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Makassar.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan segera dilaksanakan di semester gasal tahun akademik 2020/2021, sebuah program yang akan memberikan kebebasan kepada Perguruan Tinggi dan Mahasiswa, dengan tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan mampu mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dan pengalaman. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setiap kebijakan dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan hukum atau peraturan yang memperkuatnya. Kebijakan yang dikeluarkan adalah peraturan-peraturan baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi, serta mesti sejalan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.

Hasil observasi awal di Universitas Negeri Makassar, pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka belum dilaksanakan oleh seluruh Prodi yang ada. Berbagai kendala yang dihadapi, terutama dalam penyusunan kurikulum baru yang mesti dilakukan Prodi agar sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Penerapan hak belajar tiga semester di luar program studi juga masih menjadi kendala sebab Mahasiswa merasa belum cukup ilmu yang diberikan sesuai Prodi sampai di semester lima, sehingga Mahasiswa merasa belum siap untuk mengambil hak belajar tiga semester di luar program studi. Pelaksanaan pendidikan pun harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini, yaitu dengan pembelajaran daring karena adanya COVID-19 akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di program studi yang menjalankan. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam pada Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar).

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Parsons berpendapat bahwa implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi menunjuk pada sejumlah nyata (*tangible output*), sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan di suatu bidang agar menghasilkan suatu dampak.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” yang berarti “cinta kebenaran”. Kebijaksanaan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak, dalam politik diistilahkan sebagai “*statement of intents*” atau perumusan keinginan. Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.

Secara umum “kebijakan” dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada yang berwenang mengambil kebijakan.

3. Unsur-Unsur Kebijakan

Kebijakan memiliki 4 unsur untuk dapat dikatakan sebagai kebijakan, yaitu: 1) Adanya pernyataan kehendak; 2) Pernyataan didasarkan pada otoritas; 3) Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak; 4) Adanya tujuan yang dikehendaki.

4. Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan pemerintahan menurut Thomas R. Dye (dalam Inu Kencana, 2015) adalah sebuah kebijakan negara. Pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan menjalankan peraturan organik dari konstitusi namun mempunyai kewenangan bertindak layaknya seperti lembaga legislatif, yakni menciptakan norma yang berlaku umum dan abstrak. Kewenangan pemerintah yang bebas ini akan melahirkan kebijakan yang wujudnya peraturan kebijakan.

Kewenangan pemerintah ini bukan hanya ada pada presiden tetapi juga ada pada para pembantu presiden yaitu para Menteri. Kewenangan yang dimaksudkan adalah kewenangan atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi membuat peraturan umum dan abstrak para menteri dari lembaga legislatif, dan kewenangan delegasi legislasi dari penerima kewenangan atribusi (presiden) membuat menteri memiliki kewenangan yang besar, dan melingkupi banyak aspek di dalamnya membuat berbagai peraturan atau kebijakan.

Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

1. Pengertian Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Pembelajaran Merdeka Belajar menitik beratkan pada konsep belajar yang mendalam di lingkungan masyarakat yang

lebih nyata. Kebijakan merdeka belajar ini yang kemudian melahirkan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi (PT) yang otonom dan fleksibel untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya.

2. Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara konseptual disusun dengan berorientasi pada: 1) Relevansi Pendidikan dengan dunia kerja; 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; 3) Pembelajaran kontekstual yang artinya pembelajaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau sesuai perkembangan kekinian; 4) Pembelajaran aktif, maksudnya mahasiswa menjadi pusat belajar; dan 5) Penilaian yang utuh, valid dan menyeluruh atas prestasi akademik dan non akademik.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan utama, yaitu; 1) Kemudahan pembukaan prodi baru; 2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar prodi.

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dapat dilakukan di

dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, program kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi independent, membangun desa/kuliah kerja nyata.

3. Tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Kebijakan Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menciptakan kampus yang link and mach dengan dunia kerja.

Norma Konstitusional Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit merupakan serangkaian aturan atau norma yang menciptakan, menyusun dan memaknai batasan-batasan kekuasaan atau kewenangan pemerintah.

Norma konstitusional Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Secara konstitusional, pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea

Keempat: "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai common virtues yang perlu diwujudkan bersama melalui pelembagaan Negara Indonesia. UUD NRI 1945 merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentukan undang-undang sesuai kebutuhan perkembangan yang ada.

2. Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Norma Legalitas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Legalitas yang berarti dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Legalitas dalam hal ini adalah undang-undang yang merupakan pernyataan kehendak yang orisinal dari rakyat dan menjadi sumber satu-satunya pembentukan hukum. Legalitas menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang). Norma legalitas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (sociological jurisprudence).

Penelitian yang dibahas ini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum yuridis sosiologis karena peneliti membahas mengenai pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar terkhusus kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yakni Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut, karena di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, dua prodi tersebut yang melaksanakan MBKM pada tahun 2020.

3. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian sangat penting, agar peneliti tidak terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka dengan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Yuridikitas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yaitu:
 - a. Ketentuan Konstitusional dan Hukum (positif) terkait kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan yang layak.
2. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis, yaitu:
 - a. Kurikulum, dalam hal ini kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar dan sebagai pedoman agar pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mampu menghasilkan lulusan yang siap terjun dalam dunia kerja.
 - b. Hak belajar tiga semester di luar program studi, ada beberapa bentuk kegiatan untuk belajar di luar program studi. Beberapa kegiatan ini yang ingin diketahui bentuk dan proses pelaksanaannya. Kegiatan tersebut yaitu:
 - 1) Pertukaran Mahasiswa
 - 2) Magang/praktik kerja
 - 3) Asistensi mengajar disatuan pendidikan
 - 4) Penelitian/riset
 - 5) Proyek kemanusiaan
 - 6) Kegiatan wirausaha
 - 7) Studi/proyek independen
 - 8) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
 - c. Kultur belajar yang inovatif, variatif dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan mampu menciptakan kultur belajar tersebut.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yaitu:

- a. Kendala Program Studi, dalam hal ini kendala yang dialami oleh program studi atau pun dosen Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar selama persiapan dan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta upaya yang dilakukan.
- b. Kendala Mahasiswa, dalam hal ini dalam hal ini kendala yang dialami oleh mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta upaya yang dilakukan.

4. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan

Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan yaitu :

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Analisis data dan
- d. Penafsiran hasil analisis

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh langsung dari pimpinan universitas, dosen dan mahasiswa, ada 4 orang pimpinan universitas, 3 dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, 5 dosen Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, 8 mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara dan 10 mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah dan surat kabar.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, dengan alat bantu instrumen pendukung seperti HP untuk merekam dan mengambil gambar, laptop, buku catatan serta pedoman wawancara. Peneliti juga menjadi instrumen kunci yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

7. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapatkan dengan penelusuran data primer, dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Data sekunder sebagai sumber

kepuustakaan, atau dokumen berasal dari hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan oleh peneliti di Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dalam hal ini Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis, serta melalui media sosial. Observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah saat awal pelaksanaan MBKM di Universitas Negeri Makassar yaitu awal Agustus, 2020. Observasi lanjutan dilakukan saat penelitian yaitu pada tanggal 25 Februari 2021 sampai 15 Juni 2021 dengan mengamati sosialisasi MBKM dan proses pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar program studi.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara individual dan wawancara terstruktur yaitu dimana peneliti telah menyediakan instrumen penelitian yang berupa pedoman wawancara dalam bentuk tertulis. Wawancara ini ditujukan kepada narasumber dan informan. Narasumber yaitu Pimpinan Universitas: Dekan FIS-H UNM, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Sementara informan adalah dosen dan mahasiswa. Proses wawancara dimulai pada tanggal 31 Maret 2021 10 Mei 2021. Sebanyak 10 Mahasiswa dan 5 Dosen Prodi Ilmu Administrasi Bisnis serta 8 Mahasiswa dan 3 Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara. Wawancara dilakukan di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Lt. 1 dan 2, serta ditempat dimana informan atau narasumber bersedia dengan penentuan informan secara Purposive Sampling.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dan dalam bentuk tercetak atau tertulis yang bersifat resmi digunakan dalam melengkapi informasi serta digunakan sebagai bukti. Penelitian

ini dokumen yang dijadikan bahan penelitian adalah berupa gambar dan data yang diperlukan terkait penelitian.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi yang dilakukan penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan menggunakan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dan wawancara, observasi dan dokumen.

9. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Yuridiktas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Universitas Negeri Makassar mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Makassar. Keputusan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dalam penyelenggarannya diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang disebutkan di atas. Kebijakan yang dikeluarkan ini tentunya berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 bahwa:

Pasal 4:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini berada dalam naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memiliki tugas sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 137 Permendikbud No. 45 Tahun 2019 bahwa: “Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan tinggi akademik”

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini hadir untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Presiden tersebut hadir sebagaimana presiden memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, dalam menyelenggarakannya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana dalam dasar menimbang Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNl. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Kata Pengantarnya dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020, sebagai berikut:

“Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.”

Hal tersebut di atas selaras dengan apa yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl Bab I Pasal 1 yang

menjelaskan terkait ketentuan umumnya sebagai berikut:

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.”

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini tentunya didasari dengan peraturan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi sangat diperlukan sehingga Peraturan Pemerintah hadir sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan Undang-Undang, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi hadir untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Pendidikan di Indonesia perlu diatur dalam sebuah sistem pendidikan agar mencapai apa yang diharapkan dalam UUD NRI 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hadir untuk melaksanakan hal tersebut.

Peraturan dan undang-undang yang disebut di atas berdasar pada norma konstitusional yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 C ayat (1).

Peneliti juga memperoleh hasil penelitian di lapangan terkait yuridiktas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terkait pemberian pendidikan yang layak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Bapak Firman Umar selaku Wakil Dekan Akademik FIS-H serta

Bapak Guntur dan Ibu Aslinda selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis, bahwa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini adalah program yang tentunya akan mampu menjadi ruang untuk penambahan kompetensi lain dalam Pendidikan. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini akan menambah pengalaman mahasiswa (S1) di luar dari *background* jurusan atau program studinya, sehingga mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya untuk membantunya dalam dunia kerja, sehingga dinilai mampu untuk mendorong Pendidikan yang lebih layak.

2. Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di FIS-H

Memperlancar pelaksanaan MBKM di Universitas Negeri Makassar, pihak universitas telah membentuk Tim MBKM UNM serta menyusun Buku Pedoman MBKM UNM. Melalui Buku Pedoman MBKM tersebut setiap fakultas mesti menginisiasi setiap prodi untuk menyusun kurikulum prodi yang berbasis MBKM sebab pihak universitas ataupun program studi wajib memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar pada angkatan pertama yang melaksanakan MBKM yaitu pada tahun ajaran 2020/2021. Ada dua prodi yaitu Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kemudian diangkat kedua pada tahun 2020/2021 menyusul program studi yang lain, yaitu program studi PPKn, Sejarah, Pendidikan IPS, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Sosiologi, dan Pendidikan Administrasi Perkantoran.

Kurikulum, pada tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil, program studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Negara telah menyusun kurikulum berbasis MBKM, dengan berpacuan pada buku pedoman MBKM, KKKNI, kurikulum asosiasi ilmu administrasi bisnis, kurikulum asosiasi ilmu administrasi negara, kurikulum lama prodi. Penyusunan kurikulum dipersiapkan dengan membentuk

Kurikulum, MBKM Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dapat dilihat dalam gambar berikut:

[illegible]

No	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	Pengantar Teori Administrasi Publik	3
2	Administrasi Pembangunan	3
3.	Keuangan Negara	3
4.	Sistem Administrasi Negara	3
5.	Manajemen Pelayanan Prima	3
6.	Manajemen Pembangunan Daerah	3
7.	Hukum Administrasi Negara	3

Memasuki semester genap tahun ajaran 2020/2021 setiap program studi lainnya di FIS-H UNM telah menyusun kurikulum berbasis MBKM.

Pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar program studi di FIS-H UNM, pada tahun pertama program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi melaksanakan pertukaran pelajar, serta Ilmu Administrasi Bisnis juga melaksanakan

Persiapan yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Negara adalah berupa sarana daya manusia, sumber daya sarana dan sumber daya informasi. Sumber daya manusia adalah para dosen atau tim *work*, Sumber daya sarana yakni adanya *google form* yang disediakan untuk mendaftar. Serta sumber daya informasi yakni adanya SOP alur pendaftaran setiap program MBKM yang ingin diikuti.

Kultur belajar yang inovatif, variatif dan sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa, pembelajaran yang dilaksanakan di program pertukaran pelajar rata-rata menggunakan *via zoom, google meet, google classroom* dan *Syam OK*. Metode pembelajarannya ceramah, diskusi dengan berbasis *problem solving*.

3. Kendala Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di FIS-H UNM

Kendala yang dialami oleh program studi dalam melaksanakan MBKM ini adalah perlunya program studi menyusun ulang kurikulum yang bersesuaian dengan pedoman MBKM, serta masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana yang memadai, serta masih sedikitnya program studi yang

melaksanakan MBKM yang *background* Pendidikan atau pembelajarannya diperlukan.

Kendala yang dialami mahasiswa adalah kendala dalam mempersiapkan administrasi yaitu sulitnya menemui dosen terkait, jaringan yang kurang stabil saat pembelajaran karena masih pembelajaran dimasa pandemi, kurangnya kegiatan saat magang, sosialisasi yang dirasa masih kurang terkhusus dari program studi sendiri.

Pembahasan

1. Yuridikitas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah suatu Kebijakan yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadirkan untuk mengarahkan pendidikan yang lebih layak lagi, pendidikan yang fleksibel dan mampu mendorong kemampuan mahasiswa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan siap menghadapi dunia kerja, dengan memberikan kebebasan kepada kampus untuk mengelola perguruan tingginya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan suatu struktur yang berada di bawah naungan Presiden bertugas membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan tinggi akademik. Mendorong kecerdasan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual yang berbudaya demokratis, kreatif dan berkarakter Tangguh. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini telah sesuai dengan kewenangan atribusi Presiden. Kewenangan atribusi membuat menteri memiliki kewenangan yang besar, dan melingkupi banyak aspek di dalamnya membuat berbagai peraturan atau kebijakan, serta melaksanakannya.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dianggap telah sejalan dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang ada. Merdeka Belajar-Kampus merdeka adalah suatu kebijakan yang akan mendorong mahasiswa untuk mampu menguasai berbagai keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Hal ini sejalan dengan KKNI yang menyandingkan dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja.

Kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijalankan oleh Perguruan Tinggi salah satunya Universitas Negeri Makassar sendiri telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dinilai telah sejalan dengan visi misi Universitas.

2. Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di FIS-H UNM

a. Kurikulum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mulai dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020. Pada tahun 2020 Universitas Negeri Makassar telah menyusun Buku Pedoman MBKM. Pada tahun 2021 Universitas Negeri Makassar juga telah menyusun 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dan telah di launching. Buku Panduan MBKM UNM dan BKP ini dapat di cek pada SIM MBKM UNM pada link berikut: <https://mbkm.unm.ac.id>. Buku pedoman ini menjadi panduan bagi program studi disetiap fakultas untuk mempersiapkan kurikulum dan melaksanakan hak belajar 3 semester di luar program studi.

Hampir semua program studi di FIS-H telah menyusun kurikulum berbasis MBKM dan telah melaksanakan program MBKM, mulai dari angkatan pertama pada tahun ajaran 2020/2021 adalah prodi Ilmu Administrasi

Bisnis, Ilmu Administrasi Negara, lalu pada angkatan kedua menyusul prodi PPKn, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Sejarah, Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Pendidikan IPS, Pendidikan Administrasi Perkantoran. Prodi Ilmu Hukum sendiri belum melaksanakan program MBKM pada kegiatan hak belajar 3 semester di luar program studi.

b. Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi

Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) kegiatan belajar di luar program studi. Kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Pertukaran Mahasiswa
- 2) Magang/praktik kerja
- 3) Asistensi mengajar disatuan pendidikan
- 4) Penelitian/riset
- 5) Proyek kemanusiaan
- 6) Kegiatan wirausaha
- 7) Studi/proyek independen
- 8) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Pelaksanaan Kebijakan Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi di Universitas Negeri Makassar di mulai pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 sesuai amanat Surat Keputusan Rektor Nomor 329/UN36/KR/2020. Kegiatan tersebut dari hasil penelitian dapat dijalankan oleh program studi secara mandiri atau dapat ikut dengan program yang telah jalan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 di FIS-H UNM telah ada dua prodi yang melaksanakan program MBKM, yaitu Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa, magang dan kewirausahaan.

Pada semester genap tahun akademik 2020/2021 hampir semua prodi di FIS-H UNM telah mempersiapkan dan menjalankan program MBKM, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan satu kegiatan hak belajar 3 semester di luar program studi yaitu Kampus Mengajar Angkatan 1. Prodi di FIS-H UNM yang melaksanakan atau mengikuti program MBKM dapat dilihat pada Tabel berikut.

Program Studi	Kegiatan MBKM yang Dijalankan/Diikuti
Ilmu Administrasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa ke Program Studi Ilmu Administrasi Negara UNM ▪ Program Magang ▪ Program Kewirausahaan
Ilmu Administrasi Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa ke Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UNM ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
PPKn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa dan Dosen ke UNESA ▪ Kerjasama terkait penelitian ke UNESA ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
Pendidikan Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa ke UNY ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
Pendidikan Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa dan Dosen ke Universitas Semarang ▪ KKN Tematik ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
Pendidikan IPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa dan Dosen ke Universitas Semarang, UNESA, UNJ, UNY, Universitas Negeri Malang ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa ke Universitas Mataram dan Universitas Jember ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
Pendidikan Antropologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran Mahasiswa ke Universitas Esa Unggul
Pendidikan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertukaran dosen, kerjasama bidang publikasi dan <i>conference</i> ke Universitas Jember ▪ Kampus Mengajar Angkatan 1
Ilmu Hukum	Belum ada

Memasuki semester gasal tahun Akademik 2021/2022 Kementerian telah menjalankan 4 program yakni: Kampus Mengajar Angkatan 2, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Magang dan Studi Independen. Program lainnya masih persiapan untuk dijalankan. Pendaftaran kegiatan ini dapat dilakukan melalui link: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>. Pelaksanaan program tetap melalui koordinasi dengan pihak universitas. Mahasiswa yang akan mendaftar program MBKM yang dijalankan oleh Kementerian juga mesti melakukan pendaftaran melalui link MBKM Universitas Negeri Makassar: <https://mbkm.unm.ac.id>.

Sosialisasi di tahun ajaran 2020/2021 telah dilaksanakan baik melalui zoom untuk sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen serta melalui WA kepada mahasiswa. Memasuki semester gasal tahun ajaran 2021/2022 pihak universitas telah lebih memaksimalkan sosialisasi, baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa, terkait program MBKM ini. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak 14 kali.

c. Kultur Belajar yang Inovatif, Variatif dan Sesuai Kebutuhan Mahasiswa

Kultur belajar yang inovatif dan variatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang berbeda dari keadaan sebelumnya atau merupakan suatu proses pembelajaran baru untuk memotivasi dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam belajar. Secara umum, pembelajaran inovatif dan variatif digambarkan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa terlibat dalam berbagi kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka.
- 2) Dosen menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan dan cocok bagi mahasiswa.
- 3) Dosen mengatur kelas dengan mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.

- 4) Dosen menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.
- 5) Dosen mendorong mahasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan masalah, untuk mengungkapkan gagasannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kultur belajar yang inovatif dan variatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dinilai telah ada unsur inovatif dan variatifnya, karena pembelajaran dapat dilakukan dimana saja secara daring, Mahasiswa dapat memilih sesuai dengan minatnya serta mencari pengalaman kegiatan belajar di luar program studi yang kemudian dapat dikonversi menjadi beberapa SKS. Mahasiswa dibebaskan (merdeka) memilih bentuk pembelajaran yang ingin diikuti.

Pembelajaran inovatif dan variatif pada program MBKM yang telah dijalankan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum terutama pada Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara dalam hasil penelitian unsur inovatif dalam pembelajaran telah memenuhi namun dalam variatifnya masih perlu ditingkatkan. Inovatifnya yaitu Mahasiswa dapat belajar di lingkungan manapun, pada pertukaran Mahasiswa serta mahasiswa memperoleh fokus ilmu yang berbeda. Pada program magang dan kewirausahaan mahasiswa dapat belajar di kantor atau perusahaan yang kemudian dapat dikonversi menjadi beberapa SKS.

Pada hasil penelitian pertukaran Mahasiswa antar Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara pembelajaran inovatif yang dilakukan adalah penyelesaian kasus, serta diskusi antar mahasiswa yang tetap dosen sebagai fasilitator dalam belajar dan diskusi, tapi Mahasiswa yang tetap dituntut lebih aktif. Sementara variatif dalam pembelajaran dinilai masih perlu ditingkatkan karena mahasiswa merasa kebanyakan pembelajaran yang diberikan hanyalah pemberian materi (jurnal atau video) lalu ditugaskan untuk membuat ulasannya. Masih kurang sekali diskusi secara

langsungnya, serta media pembelajaran yang digunakan hampir sama.

Pada program magang inovatif dan variatifnya yang didapatkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa merasa memperoleh pengalaman baru bagaimana bekerja langsung. Mahasiswa merasakan perbedaan pada teori dan praktik terutama pada pengolahan data akuntansi di excel, teknik pemasaran, persuratan, dan pembuatan laporan penjualan. Program Kewirausahaan pada hasil penelitian tentunya mahasiswa didorong untuk membuat produk baru yang menarik serta beragam.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa hanya saja dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar hal-hal yang dibutuhkan mahasiswa seperti memperoleh fokus ilmu yang berbeda secara maksimal, pengalaman yang luas serta kemampuan kewirausahaan betul-betul dapat diperoleh dengan baik oleh mahasiswa.

3. Kendala Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di FIS-H UNM

Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu program studi yang telah melaksanakan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tentunya program studi, dosen dan mahasiswa selaku pelaksana mengalami berbagai kendala.

a. Kendala Program Studi

Kendala yang dialami Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah:

- 1) Mestinya menyesuaikan ulang kurikulum agar berbasis MBKM yang menyiapkan lulusan untuk ke dunia kerja dan dunia usaha
- 2) Singkatnya waktu penyusunan kurikulum MBKM Prodi yang diberikan karena kurikulum disusun diawal semester gasal tahun akademik 2020/2021 sehingga program pertukaran Mahasiswa baru

dimulai saat setengah semester telah berjalan

- 3) Masih kurangnya minat Mahasiswa karena mestinya membatalkan salah satu mata kuliah pada KRS yang telah diprogram sebelumnya
- 4) Masih kurangnya prodi yang melaksanakan pertukaran Mahasiswa yang mata kuliahnya sesuai dan sejalan kebutuhan mahasiswa
- 5) Kesiapan sumber daya dosen masih kurang
- 6) Masih kurangnya mitra untuk magang dan kewirausahaan.

Upaya yang dilakukan program studi ataupun dosen agar kendala pelaksanaan dapat dihadapi dan diatasi yaitu pada penyusunan kurikulum dengan kerja sama dosen-dosen kurikulum MBKM prodi segera tersusun, sebaiknya persiapan pelaksanaan program dilaksanakan diawal agar maksimal, serta perlunya peningkatan infrastruktur, perlu peningkatan prodi yang melaksanakan MBKM perluasan mitra ke universitas lain, peningkatan sumber daya serta perlunya memperbanyak MoU ke perusahaan dan kantor untuk pelaksanaan magang dan program kewirausahaan MBKM.

Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan MBKM adalah:

- 1) Masih kurangnya prodi lain yang menerapkan MBKM yang bersesuaian dengan background program studi.
- 2) Masih perlunya pengoptimalan sumber daya manusia yaitu kemampuan dosen
- 3) Masih kurangnya teknologi informasi yang memadai
- 4) Perlunya menyusun kembali RPP yang sesuai kurikulum MBKM Prodi
- 5) Padatnya jadwal mengajar dosen
- 6) Sosialisasi yang dilaksanakan masih perlu lebih maksimal.

Upaya yang dilakukan Prodi Ilmu Administrasi Negara adalah sementara menyusun modul digital untuk pembelajaran yang akan digunakan sebagai panduan mahasiswa, terkait jadwal mengajar dosen yang padat dosen mengupayakan komunikasi dengan mitra mengajar, prodi telah merencanakan untuk melaksanakan

pelatihan khusus untuk dosen, untuk memassifkan sosialisasi prodi berupaya untuk sosialisasi berikutnya dilaksanakan secara bertahap.

b. Kendala Mahasiswa

Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dalam pelaksanaan MBKM pertukaran Mahasiswa ada beberapa mahasiswa tidak mengalami kendala, serta beberapa mahasiswa lain mengalami kendala, kendala yang dialami dari hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Proses pembelajaran yang masih kurang variatif;
- 2) Masih kurang pahami mahasiswa dengan materi Mahasiswa;
- 3) keterlambatan penginputan nilai mata kuliah yang di programkan pada pertukaran Mahasiswa;
- 4) Jaringan yang kurang stabil melihat pembelajaran saat ini daring;
- 5) Kurang cepatnya ditanggapi oleh dosen dalam pengurusan administrasi;
- 6) Kurangnya kegiatan saat magang pada kondisi covid;
- 7) Masih kurangnya mitra dalam program magang sehingga mahasiswa diminta mencari tempat magang sendiri;
- 8) Kurang massifnya sosialisasi;
- 9) Pada mahasiswa yang mengikuti program magang masih ada rasa khawatir terkait konversi nilainya.

Upaya yang dilakukan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis pada pertukaran Mahasiswa adalah berusaha memahami materi melalui internet agar lebih paham, serta pada program magang tidak ada upaya yang signifikan dilakukan karena memang kondisi covid yang menjadi kendala sehingga kurangnya kegiatan, upaya pada kewirausahaan untuk pembuatan produknya dilakukan secara online dan pembelian produk secara online. Upaya lain yang mesti dilakukan adalah memassifkan sosialisasi kepada mahasiswa.

Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara dalam pelaksanaan pertukaran Mahasiswa dan Kampus Mengajar Angkatan 1 beberapa mahasiswa merasa tidak

mengalami kendala sementara mahasiswa lainnya mengalami kendala sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dasar keilmuan yang diperoleh sebelum melakukan pertukaran Mahasiswa;
- 2) Kurang efektifnya proses pembelajaran melalui google classroom;
- 3) Jaringan yang kurang stabil;
- 4) Sosialisasi masih kurang;
- 5) Adanya jadwal mata kuliah yang bertabrakan;
- 6) MBKM ini dimulai dipertengahan semester sehingga mahasiswa mesti menukar mata kuliah yang sebelumnya di program;
- 7) Materi perkuliahan yang diberikan masih kurang;
- 8) Lambatnya penginputan nilai;
- 9) Pada program kampus mengajar sulitnya membangun komunikasi dengan pihak sekolah;
- 10) Kondisi yang masih dalam pandemi.

Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencari jaringan yang stabil, memperbanyak bertanya kepada mahasiswa di prodi yang ditempati pertukaran Mahasiswa, belajar mandiri melalui internet, serta mengkomunikasikan mata kuliah yang bertabrakan, mengkomunikasikan terkait penginputan nilai.

KESIMPULAN

1. Yuridiktas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas membantu tugas presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah merumuskan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam perumusan dan pelaksanaannya telah sejalan dengan dasar hukum dan sejalan dengan tujuannya untuk menyediakan pendidikan yang layak dan lebih baik.
2. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yaitu:
 - a. Kurikulum, telah disusun oleh 9 dari 10 program studi di FIS-H UNM dengan

- berpedoman pada Buku Pedoman MBKM.
- b. Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi dapat diikuti melalui program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dapat melalui program MBKM yang dilakukan oleh program studi secara mandiri. Tahun ajaran 2020/2021, di FIS-H UNM telah melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan program magang, program kewirausahaan, KKN tematik, kerjasama bidang penelitian dan publikasi, serta mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 1 yang dilaksanakan Kemendikbud. Program MBKM yang dilaksanakan di FIS-H UNM telah berjalan dengan baik.
 - c. Kultur Belajar yang Inovatif, Variatif dan Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa, program MBKM yang dijalankan sudah inovatif dengan adanya program baru yang membebaskan mahasiswa, dan telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, namun dalam unsur variatif masih kurang karena proses pembelajaran yang relatif sama.
3. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yaitu:
 - a. Kendala yang dialami Program Studi dan dosen adalah: perlunya menyesuaikan ulang kurikulum, kurangnya SDM, kurangnya mitra magang dan kewirausahaan, masih kurangnya prodi lain yang menjalankan MBKM yang bersesuaian background prodi asal, serta padatnya jadwal mengajar dosen.
 - b. Kendala yang dialami Mahasiswa sebagai berikut: Jaringan yang kurang stabil, proses pembelajaran yang kurang interaktif, sosialisasi yang masih perlu di massif terkhusus dari program studi, lambatnya penginputan nilai, kurangnya kegiatan di masa covid untuk program magang, pengecekan

bahan untuk produk wirausaha secara langsung tidak dapat dilakukan, sulitnya membangun komunikasi dengan pihak sekolah pada program Kampus Mengajar Angkatan 1.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan lebih merincikan aturan hukum dikeluarkannya suatu kebijakan.
2. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam hal sosialisasi masih perlu ditingkatkan, pembekalan dalam penyusunan kurikulum prodi berbasis MBKM masih perlu dilakukan, serta hak belajar 3 semester pelaksanaannya perlu disegerakan kedelapan bentuk kegiatan pembelajarannya agar lebih mampu mendorong kultur belajar yang inovatif dan variatif, serta perlunya meningkatkan mitra dengan perusahaan.
3. Mengetahui kendala yang dialami oleh program studi, dosen dan mahasiswa sebaiknya pihak universitas ataupun kementerian menyebarkan kuesioner atau angket kendala selama mengikuti program. Agar dapat dilakukan perbaikan ke depannya dengan segera.

Peneliti juga memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Negeri Makassar dan Program Studi
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan Universitas dan Prodi dalam mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Untuk kedepannya, seluruh program studi di Universitas Negeri Makassar dapat mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 - c. Memperbanyak sosialisasi terkait Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan program-program yang tengah berjalan.

2. Bagi Dosen
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini, dosen bisa mengevaluasi kegiatan mengajar dan pembimbingan pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
 - b. Dosen lebih berinovasi dalam pembelajaran
 - c. Dosen lebih membentuk pembelajaran yang lebih variatif.
 - d. Dosen menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk mendapatkan hak-haknya dalam Pendidikan, mahasiswa tidak melupakan kewajibannya untuk mengembangkan dirinya sendiri agar lebih mandiri.
 - b. Turut serta dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan variatif serta mandiri.
 - c. Mahasiswa agar lebih meningkatkan partisipasi dalam kegiatan dan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Cetakan ke-1. Malang: SETARA Press.
- Andi Kaharuddin dan Nining Hajeniati. 2020. Pembelajaran Inovatif dan Variatif. Pedoman untuk Penelitian PTK dan Eksperimen. Gowa: CV. Berkah Utami.
- Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 2020. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 2020. Universitas Negeri Makassar.
- Faried Ali dan Andi Syamsu Alam. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah. Cetakan ke-2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fernando M. Manulang. 2017. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah. 2016. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Edisi 1 Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafie. 2015. Ilmu Pemerintahan. Cetakan ke-3. Jakarta. Bumi Aksara,
- Jimly Asshiddiqie. 2009. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.
- Pan Mohammad Faiz. 2019. Amandemen Konstitusi Komparansi Negara Kesatuan dan Negara Federal. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.
- Parsons Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ripley, dkk. 1982. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition. Amerika: The Dorsey Press.
- Saifullah. 2015. Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh). Malang: Intelegensia Media.
- Suharno. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Solichin Abdul Wahab. 2010. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi ke-2. Cetakan ke-7. Jakarta: Bumi Aksara.

2. Jurnal

- Erwan Kustriyono, dkk. 2020. Merdeka Belajar dalam Pembelajaran BIPA di Universitas Pekalongan. Prosiding Seminar Nasional Konferensi Ilmiah Pendidikan 2020. 1(1), 94-97
- Firman Muin dan Herman. 2018. Direksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Tanjungpura Law Jurnal*. 2(2), 151-165.
- Herman. 2020. Covid-19 dan Kebijakan Hukum Pemerintah. *Institute for Indonesia Critical Legal Studies*. Edisi I Juli, 1-2.
- Herman dan Firman Muin. 2018. Sistematisasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 4(2). 89-101.
- Muhammad Addi Fauzan & Fandi Nur Rohman. 2019. Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum*. 35(2), 127-152.
- Muslikh. 2020. Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*. 1(3), 40-46.
- Nanda Alfian Kurniawan, dkk. 2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Merdeka Belajar Bag Calon Konselor. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. 69-72.
- Sarwiji Suwandi. 2020. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. 1-12.

3. Undang-Undang/Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Internet

- Dian Islamiati. "UNM akan Terapkan Kampus Merdeka Mulai Tahun Ajaran 2020-2021". 20 Juli 2020 <http://estetikapers.com/unm/unm-akan-terapkan-kampus-merdeka-mulai-tahun-ajaran-2020-2021.html>
- Saparuddin. "Call For Papers: Seminar Nasional Biologi dengan Tema Inovasi Penelitian Biologi dan Pembelajarannya di Era Merdeka Belajar". 20 Juli 2020. <http://bio.fmipa.unm.ac.id/2020/06/29/webinar-biologi-seri-1-dengan-tema-inovasi-penelitian-biologi-dan-pembelajarannya-di-era-merdeka-belajar/>
- Wahyu Susanto. "Kebijakan Kampus Merdeka, Rektor UNM Sebut Kebijakan yang Dinanti, Begini Penjelasan Nadiem Makarim?". 20 Juli 2020 <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/03/kebijakan-kampus-merdeka-rektor-unm-sebut-kebijakan-yang-dinanti-begini-penjelasan-nadiem-makarim>

5. Studi yang Tidak Diterbitkan

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhammad Tohir. 2020. Merdeka
Belajar: Kampus Merdeka. Doi:
10.31219/0sf.io/sv8wq.
- So Woong Kim. 2009. Kebijakan Hukum
Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup. Tesis. Semarang:
Universitas Diponegoro.